

**INCUMBENT: KEKUATAN MODAL SOSIAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI
PULAU BAWEAN INDONESIA**

Hasanul Bulqiyah, Sri Musrifah

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

hasanulbulqiyah@unirow.ac.id

*Received: 04 September 2022; Revised: 30 Oktober 2022; Accepted: 15 November 2022;
Published: Desember 2022; Available online: Desember 2022*

Abstract

The purpose of this research is to see how the strength of the incumbent's social capital in participating in the Pilkades on Bawean Island. The incumbent's victory in the village head election on Bawean Island is an interesting study to look at, various perspectives of the pros and cons of the community as a general topic discussed regarding the incumbent especially in his performance as a leader in the first period in developing the village. Qualitative methods were used in this study to explore the power of social capital possessed by the incumbent in participating in the Pilkades. This study found that the social capital owned by the incumbent was obtained when he led in the first period through an approach to community leaders. In addition, it was found that the victory obtained by the incumbent in the Pilkades on Bawean Island was not only limited to the strength of social capital, but there is economic capital or better known as the practice of money politics. Uniquely, the practice of money politics is not carried out directly by the incumbent in the pilkades, but done by the supporters, however there is no prohibition from the incumbent on the behavior of his supporters. Finally, the incumbent participates in the pilkades as the basis for sustainable village progress, but back to the speculations of society and the facts, there is no significant in developing the village.

Keywords: Bawean Island, Incumbent, Social Capital, Village Head

Pendahuluan

Penerapan sistem praktik politik demokrasi paling bawa berada pada tingkat desa. Sejauh ini politik desa semakin dinamis sesuai dengan peluang dan tantangan baik secara sosial maupun geografis. Kontestasi pemilihan kepala desa atau biasa disingkat dengan sebutan pilkades menjadi pemilihan yang disenangi oleh masyarakat, sebab pemilihan tersebut merupakan bentuk penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Bulqiyah et al., 2019). Selain itu, adanya pilkades untuk mencari pemimpin yang memanfaatkan desentralisasi secara baik, dengan keunggulan yang dimiliki oleh desa tersebut dan mengembangkan inovasi maupun kebijakan yang menjadi kebutuhan penduduk desa (Sobari, 2019).

Saat ini, gambaran dari pilkades cukup dikatakan tidak mudah dan juga tidak sulit jika dibandingkan pada pemilihan umum yang lain. Dikatakan demikian, karena secara wilayah pilkades cukup sempit sehingga untuk mengkoordinir kemenangan pada pilkades lebih mudah. Namun dikatakan juga tidak mudah karena perilaku memilih masyarakat desa cukup kompleks, maka perlu upaya yang

maksimal dalam mendapatkan dukungan suara di pilkades. Pelaksanaan kontestasi pesta demokrasi, setidaknya seorang kandidat dalam pemilihan memiliki modal untuk bisa bersaing guna mendapatkan dukungan suara pemilih sebanyak-banyaknya. Modal yang dimaksud pada kontestasi pemilihan yaitu modal ekonomi, modal sosial, dan juga modal politik. Semakin besar akumulasi modal yang dikeluarkan oleh para kandidat, maka semakin besar pula peluang dukungan yang diperoleh (Pantouw, 2012).

Namun, pada tulisan ini lebih difokuskan pada modal sosial calon kepala desa di pulau Bawean, Indonesia. Pada perkembangan demokrasi saat ini, riset studi sosiologi politik sering diminati oleh para peneliti, terlebih yang berkenaan dengan modal sosial sebagai kekuatan pada pemilihan kepala desa. Adanya modal sosial menjadi salah satu instrument untuk maju pada kontestasi pilkades, guna mendapatkan dukungan suara secara penuh untuk memenangkan pemilihan. Hal ini karena perilaku yang orientasinya mengarah pada kepentingan publik, baik ditingkat publik atau kalangan politik (Zúñiga, 2012).

Secara umum, dalam mengukur keberhasilan dari modal sosial dinilai dari kuatnya modal sosial yang dimiliki

oleh setiap individu ataupun kelompok. Sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Putnam bahwa modal sosial sebagai suatu fitur dari organisasi sosial, seperti norma, kepercayaan, relasi, yang dapat memfasilitasi tindakan dan kerjasama untuk saling menguntungkan secara kolektif (Tzanakis, 2013). Adanya modal sosial juga ditunjukkan dengan partisipasi asosiasi sipil (Lin, 2016). Terkait dengan aspek kolektif pada modal sosial diasumsikan ada kepadatan ataupun penutupan dalam hubungan sosial dan jaringan sosial. Selaras dengan ini, modal sosial dipulau Bawean banyak diadaptasi oleh incumbent sebagai proses dari pilkades.

Konsep incumbent di Indonesia terkenal pada saat pemilihan umum presiden tahun 2009, pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden mencalonkan diri kembali untuk mengikuti pemilihan presiden periode selanjutnya. Penyetanan incumbent di Indonesia pada saat itu karena sebelumnya pemilihan demokrasi di Indonesia tidak ada penantang. Hal ini merujuk pada kandidat pemilihan umum yang sebelumnya pernah menduduki jabatan tersebut dan mencalonkan kembali dan berkontestasi dengan kandidat lain. Di negara demokrasi modern konsep incumbent digunakan

sebagai bentuk dari oportunisme (Schleiter & Tavits, 2018). Pelaku incumbent mengusung oportunisme ini untuk membantu prospek pemenangan mereka pada saat pemilihan. Selain itu adanya incumbent bisa memiliki banyak relasi yang kuat terutama pada kalangan elit politik, karena pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga bisa memobilisasi tokoh masyarakat dan juga pegawai pemerintah lokal (Wahman, 2017).

Pemilihan kepala desa di pulau Bawean, baru-baru ini sering ditemui kandidat incumbent pada saat pemilihan. Tak sedikit incumbent dalam pilkades terpilih kembali untuk menduduki jabatan terpenting pada desa selama satu periode kedepan. Namun, terpilihnya kembali incumbent tidak terlihat perubahan yang signifikan pada desa yang dipimpinnya. Hakikat dari desentralisasi terutama pada otonomi desa kurang dimanfaatkan seluas-luasnya oleh pemimpin incumbent terpilih. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara umum disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan lokal yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa. Adanya regulasi kebijakan tersebut seharusnya mampu

menciptakan perubahan dan inovasi bagi desa yang ada di pulau Bawean.

Studi mengenai kemenangan incumbent dalam pemilihan kepala desa di pulau Bawean tengah menjadi kajian yang menarik untuk diketahui. Permasalahan dalam kajian ini melihat bagaimana kekuatan modal sosial incumbent dalam pilkades di pulau Bawean. Isu yang seringkali didengar pada saat pilkades di pulau Bawean, tak sedikit kandidat incumbent melakukan praktik politik uang. Telah menjadi rahasia umum adanya politik uang pada saat waktu pemilihan di negara-negara demokrasi, tak terkecuali pulau Bawean yang hanya terdapat dua administrasi wilayah kecamatan. Jika ditelaah dengan logika, seorang incumbent telah menciptakan rekam jejak selama masa kerjanya. Namun ketakutan tidak terpilihnya pada pemilihan kepala desa membuatnya terus berupaya melakukan berbagai cara dalam memenangkan kontestasi pemilihan tersebut. Jika incumbent memiliki rekam jejak yang baik dan tidak merugikan masyarakat lokal dalam masa kepemimpinan sebelumnya, maka kemungkinan besar untuk menang akan diperoleh.

Tidak sedikit yang telah melakukan penelitian terkait modal sosial, prespektif modal sosial yang

dimiliki setiap individu bahkan wilayah memiliki perbedaan sesuai dengan konteks permasalahan yang dialaminya. Namun, pada tulisan ini tetap memaparkan hasil penelitian terdahulu guna bisa melihat kembali apa yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, terkait perilaku politik yang dilakukan oleh incumbent. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Nannicini dengan judul "Social Capital and Political Accountability". Penelitian ini berawal dari keingintahuan bagaimana modal sosial dapat membantu aktor politik yang mengikuti pemilihan untuk menang dalam kontestasi tersebut. Asumsi yang diharapkan, output dari modal sosial dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga akuntabilitas politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang dimiliki oleh aktor politik memiliki potensi besar dalam keberhasilan untuk memenangkan kontestasi pemilihan. Terlebih, masyarakat akan memilih dan menjaga pemimpin dalam hal ini yaitu incumbent yang bertanggung jawab atas semua perilakunya (Nannicini et al., 2013).

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid dengan judul "Populism in The 2017 Jakarta Gubernatorial Election" pada tahun 2019. Penelitian ini dilakukan melihat

Studi kasus berusaha mengeksplorasi dan menyelidiki fenomena kekuatan modal sosial incumbent dalam pilkades di pulau Bawean secara mendalam (Hollweck, 2016). Setelah memperoleh data dengan studi kasus maka dilakukan analisis menggunakan teknik analisis model interaksi yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yaitu terdapat beberapa tahapan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, display data, kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Hasil pengumpulan data mengenai kekuatan modal sosial incumbent dalam pilkades dilakukan kondensasi data guna memfokuskan data-data yang akan digunakan, selanjutnya data akan di display sesuai dengan pengelompokan tema-tema.

Hasil dan Pembahasan

Menciptakan Hubungan Dalam Kekuasaan

Sesuai dengan pengertian incumbent yang merujuk pada elit politik yang sedang menjabat jabatan pada politik pemerintahan. Incumbent pada pilkades Agungutama di Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik tahun 2022 merupakan kepala desa terpilih pada pemilihan 2017. Kemenangan incumbent Desa Agungutama pada

pilkades 2022 juga tidak sedikit lawan dalam pemilihan. Terdapat empat orang calon kepala desa pada pilkades Agungutama tahun 2022 yang terdiri dari satu incumbent, satu anggota Badan Pemusyawaratan Desa, satu anggota perangkat pemerintah desa, dan satu lagi merupakan mantan dari kepala desa sebelum incumbent memimpin.

Pemilihan Kepala Desa Agungutama, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik di Pulau Bawean dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Agungutama tersebut merupakan jadwal mundur yang semula dijadwalkan pada bulan September tahun 2021. Kemunduran jadwal pilkades tersebut dilatar belakangi tingginya penyebaran pandemi covid-19 di Kabupaten Gresik, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pilkades yang akan menimbulkan keramaian pada masyarakat dan akan dikhawatirkan terjadi lonjakan covid-19.

Kembali pada topik utama yang akan menjadi kajian dalam artikel ini yakni modal sosial yang dimiliki oleh incumbent dalam mengikuti pilkades sebagai pesta demokrasi paling bawah di Indonesia. Incumbent pada saat mengikuti pilkades, memiliki kekuatan modal sosial yang telah ditanam sejak

lain yang berkenaan dengan pemerintah desa ditingkatkan dengan standar operasional dalam melayani yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan rasa kepuasan yang memiliki sifat pelayan sesungguhnya bagi warga desa. Sehingga, hal yang telah dilakukan oleh incumbent dalam memimpin desa Agungutama pada periode pertama bisa dikatakan untuk menciptakan image incumbent di masyarakat.

Demokrasi Patologi

Secara umum, patologi demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai penyakit yang mengrogoti sendi-sendi kehidupan dalam demokrasi. Artinya sebuah tindakan secara sengaja yang tidak seharusnya terjadi pada proses dari pelaksanaan demokrasi. Contoh kecil dari patologi demokrasi yang ada di Indonesia seperti money politic. Mungkin kata money politic sudah tidak asing bagi masyarakat terlebih yang negaranya menganut sistem demokrasi, hal ini terjadi bukan hanya pada pemilu saja, melainkan pada kehidupan lain dengan kata lain siapa yang memiliki uang dialah yang akan mendapatkan keinginannya.

Selaras dengan hal money politics, sudah menjadi hal yang semestinya kandidat dalam pemilihan memiliki massa untuk mendukung keberhasilan

yang diinginkan. Secara psikologi, pengaruh politik yang ada didalam masyarakat terjadi karena adanya kesamaan pemikiran visi dan misi antara incumbent dengan masyarakat, kemudian ada juga pengaruh politik karena didasari dari satu kesamaan keluarga, etnis, wilayah, dan lain sebagainya. Massa incumbent dalam pilkades di pulau Bawean cukup memiliki euforia yang sangat tinggi dibandingkan pada pemilu secara umum. Kabar pilkades cukup menjadi topik hangat dikalangan masyarakat, mulai dari siapa yang menjadi kandidat dalam pilkades, visi-misi kandidat, latar belakang kandidat hingga permainan praktik politik uang. Tingginya antusias masyarakat dalam pilkades tersebut karena faktor ruang lingkup demokrasi yang kecil sehingga kedekatan antara kandidat dengan masyarakat pada pilkades lebih mendapatkan kemistri.

Pada pilkades di Pulau Bawean, praktik politik uang terus digaungkan sebagai tambahan modal sosial dalam pemenangan incumbent. Kekhawatiran tidak terpilihnya kembali incumbent pada pilkades menjadi sebuah dilema bagi masyarakat yang mendukungnya. Adanya praktik politik uang sebenarnya tidak dilakukan oleh incumbent secara pribadi, melainkan dilakukan oleh

pendukung yang ingin kemenangan incumbent untuk menjadi kepala desa. Pernyataan ini diucapkan langsung oleh incumbent pada saat melakukan proses penelitian berupa wawancara mendalam.

Untuk money politic sebenarnya ada, tapi itu dari teman saya. Karena merasa sangat aman dengan suara masyarakat desa yang masih menginginkan saya untuk menjadi kepala desa selanjutnya. Sehingga perlu ambisi untuk menang, terlebih di dusun Tendang dan Sumberair. Itupun dana yang dikeluarkan sangat sedikit, karena dana yang dimiliki teman saya merupakan hasil peminjaman. Hal ini dilakukan karena tidak ingin saya gagal di pilkades (komunikasi personal, 8 Mei 2022).

Praktik politik uang tersebut yang dilakukan oleh pendukung incumbent, hanya semata ingin incumbent kembali menjabat sebagai kepala desa kembali. Walaupun sedikit banyaknya ada yang mendukung incumbent secara hati nurani karena faktor kepemimpinan

dalam periode pertama, namun hal ini akan membuat stigma buruk pada masyarakat terlebih bagi masyarakat yang tidak menyukai incumbent atau pendukung dari kandidat lain. Nyatanya incumbent mengetahui akan adanya praktik politik uang yang akan terjadi untuk dirinya walaupun praktik politik uang berasal dari orang lain yang mendukungnya dalam kemenangan pilkades. Kesempatan ini juga ternyata dimanfaatkan oleh incumbent untuk keberhasilannya dalam kemenangan pilkades, karena tidak ada penolakan yang signifikan oleh incumbent pada praktik politik uang.

Tak sedikit pendistribusian uang yang diberikan pada masyarakat sebagai pemilih oleh para pendukung incumbent yang mempraktikkan politik uang, sesuai fakta dilapangan setiap pemilih diberikan kisaran Rp. 100.000,00. Uang yang diberikan oleh pihak incumbent pada pemilih jelas lebih besar dibandingkan dengan kandidat lain yang juga mempraktikkan politik uang. Hal ini juga yang mendasari pendukung incumbent melakukan praktik politik uang, karena lawan dari incumbent juga menerapkan hal tersebut. Sehingga praktik politik uang yang dilakukan pendukung incumbent sebagai bentuk dukungan lebih pada incumbent untuk

kemenangan yang mungkin telah memiliki modal sosial ataupun modal kepemimpinan pada periode pertama.

Seorang pendukung incumbent (50 tahun) yang lahir di desa Agungutama ini menyampaikan alasan mempraktikkan politik uang untuk incumbent dalam pilkades 2022. Dia secara rasional menjelaskan :

Melakukan money politik untuk incumbent sebenarnya sebagai salah satu untuk meyakinkan pilihan masyarakat pada incumbent, saya yakin incumbent ini tak sedikit yang memilih dan mendukungnya. Hanya saja, alih-alih ambil aman untuk mengunci pilihan masyarakat (komunikasi personal, 10 Mei 2022).

Penjelasan dari pendukung incumbent mengenai praktik politik uang yang dilakukannya pada pilkades, sebagai bentuk kepedulian nyata untuk mempertahankan incumbent sebagai pemimpin di desa Agungutama. Jika dilihat secara umum, setiap kandidat pada pemilihan akan memiliki pendukung, dan setiap pendukung sudah pasti memilih kandidat yang didukungnya. Artinya, dimanapun

pemilihan dilaksanakan tidak terlepas dari rantai strukturasi antara kandidat dan pendukungnya. Menurut analisa peneliti dari prespektif positif, kecenderungan pendukung hingga berani mengambil langkah money politic pada pilkades untuk mendukung incumbent, terdapat karakter incumbent yang sepaham dengan masyarakat terlebih bagi pendukungnya. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, yang mana diketahui bahwa lawan mempraktikkan politik uang. Sehingga, dirasa takut akan kekalahan memihak pada incumbent dengan cara seperti ini, maka pendukung incumbent juga mengambil langkah yang sama untuk memperkuat dukungan suara pada pilkades.

Adanya praktik politik uang pada setiap pemilu sangat bertentangan dengan aturan kebijakan negara, hal ini sangat jelas tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun dengan demikian, secara umum masyarakat sebagai pemilih dari penerima praktik politik uang tetap mengesahkan hal ini, terlepas dari bagaimana pemilih dalam memberikan hak suaranya pada kandidat pilihannya dipilkades nanti. Sebenarnya jika ditelaah kembali adanya praktik politik uang yang diterima oleh

masyarakat, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa uang yang diterima masyarakat sedikit membantu tambahan biaya kebutuhan masyarakat sendiri. Persoalan di tempat pemungutan suara dalam memilih kandidat siapa yang akan dipilihnya itu adalah hak masyarakat. Secara pengetahuan, masyarakat sadar dilarangnya praktik politik uang dalam pemilihan, namun masyarakat ingin mengambil kesempatan dengan keuntungan yang diterimanya, sehingga bisa saja masyarakat memberikan hak suaranya pada incumbent ataupun pilihannya yang lain.

Tabel 1.
Rekapitulasi Perolehan Suara
Pilkades Agungutama 2022

Dusun	T P S	Calon	Calon2	Calon	Calon	Total
		1 (saingan)	(Incumbent)	3 (saingan)	4 (saingan)	
Rejosari	1	102	198	9	5	314
Banyuates	2	130	191	2	21	344
Sumberair	3	89	58	32	219	398
Tendang	4	80	99	7	44	230
Tendang	5	131	128	2	5	266
Total		532	674	52	294	1.552

Sumber: Panitia Kepala Desa Agungutama 2022

Rekapitulasi dari hasil perolehan suara ini nampak kejelasan bahwa incumbent dalam pilkades 2022 mendapatkan jumlah suara lebih tinggi

dibandingkan dengan kandidat lain. Menurut analisa peneliti, kemenangan incumbent pada pilkades selain modal sosial yang telah dibangun sejak masa kepemimpinannya pada periode pertama, juga dihasilkan dari praktik politik uang yang dijalankan. Pernyataan analisis peneliti didukung dari perolehan suara sesuai pada Tabel 1 yang menunjukkan hasil suara yang memiliki selisih lebih kecil antara incumbent dengan satu kandidat penantang yang juga mempraktikkan politik uang di pilkades.

Fundamental Incumbent Dalam Pilkades

Pada dasarnya setiap kandidat dalam mengikuti pilkades memiliki tujuan atau cita-cita yang diwujudkan dari proses kepemimpinan terpilih nantinya. Incumbent sebagai kandidat yang pernah menduduki sebagai pemimpin diwilayah otonomi desa, pasti memiliki rasa ketidakpuasan yang harus didapatkan. Konotasi ketidakpuasan yang dimaksudkan disini tidak selalu yang berhubungan pada hal negatif. Sesuai dengan yang dimaksudkan pada pendahuluan tentang apa sebenarnya yang ingin diwujudkan oleh incumbent sehingga mengikuti kembali kontestasi



pilkades di Agungutama. Setelah melakukan wawancara mendalam pada incumbent sebagai Kepala Desa Agungutama terpilih 2022 bahwa masih banyak program yang perlu direalisasikan pada kepemimpinan di periode ke dua. Terlebih yang berkenaan dengan permasalahan pengangguran yang dialami oleh warga desa Agungutama serta membuka peluang potensi yang ada di Desa Agungutama. Pernyataan ini dikeluarkan langsung oleh incumbent.

Pertama, mengatasi pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja melihat potensi yang ada di Desa Agungutama seperti adanya dua Pelabuhan penumpang dan barang, melalui kerjasama pada Dinas Perhubungan untuk lahan parkir. Kedua, adanya tempat pengolahan sampah yang telah dibangun. Ketiga, mempersiapkan sumur bor dengan tujuan menyalurkan air bersih yang akan dikelola langsung oleh BUMDes (komunikasi personal, 8 Mei 2022).

Dari hasil temuan tersebut mencalonkannya kembali incumbent pada pilkades untuk mengatasi persoalan publik yang ada di Desa Agungutama. Namun jika kembali melihat sejenak pada kepemimpinan incumbent di periode pertama, pembangunan desa secara fisik, ataupun pemberdayaan sebagai salah satu langkah strategis untuk pembangunan yang berkelanjutan kurang nampak dan dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi, hal ini tertutupi oleh sebagian masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa di kepemimpinan incumbent. Pelayanan yang dimaksud yaitu tersalurkannya bantuan-bantuan dari program pemerintah pusat yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian, menjaga hubungan dengan masyarakat desa melalui permintaan untuk hadir di acara-acara tertentu, menjadikan salah satu incumbent mendapat dukungan lebih yang disebut sebagai bagian dari modal sosial.

Sebagai salah satu desa yang wilayahnya masuk dalam central Pulau Bawean. Seharusnya Agungutama mampu menciptakan tatanan otonomi desa yang lebih baik dari berbagai bidang. Keseimbangan pembangunan diberbagai bidang, atau antar daerah dirasa mampu dalam meningkatkan

baru untuk meningkatkan mutu desa. Terlebih pembangunan-pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat desa. Terlepas dari dukungan sisi politik uang, terpilihnya kembali incumbent sebagai kepala desa di Agungutama ada harapan yang dititipkan oleh masyarakat, untuk masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk menjadi pemimpin, seyogyanya menjadikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat nantiya. Jika sebelumnya masyarakat desa Agungutama nyaman dengan sikap yang ditampilkan di dalam sosial masyarakat, maka selanjutnya pembangunan yang berkelanjutan untuk ditampilkan di Desa Agungutama dengan segala potensi yang ada pada desa tersebut.

Daftar Pustaka

- Bulqiyah, H., Muadi, S., Tawakkal, GTI. (2019). The village head election and participation of marginal community: a case study in bawean island, indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 68–80.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Hamid, A. (2019). Populism in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. *Journal of Governance*, 4(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v4i1.4874>
- Hollweck, T. (2016). Robert K. Yin. (2014). *Case Study Research Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 pages. *The Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1). 1-5. doi: 10.3138/cjpe.30.1.108
- Lin, N. (2017). Social Capital Theory an Research, *Building a Network Theory of Social Capital* (pp. 3-28). New York: Routledge.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, Singapore: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.
- Nannicini, T., Stella, A., Tabellini, G., & Troiano, U. (2013). Social capital and political accountability. *American Economic Journal: Economic Policy*, 5(2), 222–250. doi: 10.1257/pol.5.2.222
- Pantouw, S., M., I. (2012). *Modalities in political contestation*. Semarang: Thesis Diponegoro University.
- Schleiter, P., & Tavits, M. (2018). Voter reactions to incumbent opportunism. *Journal of Politics*, 80(4), 1183–1193. doi: [10.1086/698758](https://doi.org/10.1086/698758)

- Sobari, W. (2019). The Practice of Political Entrepreneurship in a Rural Javanese Village. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(1), 30–44. doi: 10.22146/JSP.38420
- Tzanakis, M. (2013). Social capital in Bourdieu's, Coleman's and Putnam's theory: empirical evidence and emergent measurement issues. *Educate*, 13(2), 2–23. Retrieved from <http://educatejournal.org/index.php/educate/article/view/366>
- Wahman, M. (2017). Nationalized incumbents and regional challengers: Opposition- and incumbent-party nationalization in Africa. *Party Politics*, 23(3), 309–322. doi: 10.1177/1354068815596515
- Zúñiga, G.D.Z. (2012). Social Media Use for News and Individuals' Social Capital, Civic Engagement and Political Participation. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 17(3), 319–336. doi: 10.1111/j.1083-6101.2012.01574.x